

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Rabu
08 Mei 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

DPRD dan Pemkot Baubau Mulai Bahas Rencana Merger OPD



Pemkot Baubau bersama DPRD mulai bahas rencana penggabungan beberapa OPD

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Upaya Pemerintah Kota Baubau membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memaksimalkan fungsi-fungsi peran OPD, salah satunya dengan melakukan merger (penggabungan) OPD teknis, kini jadi bahasan serius di DPRD melalui Panitia Khusus (pansus), sebelum ditetapkan sebagai Peraturan daerah.

Pemda Buton Kembangkan Jeruk Siompu



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbang)

Kabupaten Buton yang bekerja sama dengan Asosiasi Mikoriza Indonesia (AMI-RI) pusat melakukan Uji Efektifitas Fungsi Mikoriza Ar-

buskula dan Pemberian Pupuk Organik Bio-hara terhadap pertumbuhan jeruk Keprok Siompu Skala Lapangan di Kabu-

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau Surati Pj Gubernur Terkait Berakhirnya Masa Jabatan Pj Sekda



Pj Sekda Baubau Saido Bonsai

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau sudah bersurat kepada Pj Gubernur

Sultra untuk melaporkan tentang kondisi masa berakhir penunjukan Pj Sekda Kota Baubau yang be-

Lanjutkan ke Hal: 7

Mendagri Instruksikan Pemda Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dukung Forum Air Sedunia Ke-10

Peliput: Lisna

JAKARTA, BP-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah



Titi Karnavian

Lanjutkan ke Hal: 7

Lanjutkan ke Hal: 7

Toreh Sejarah Baru, Indeks Perkembangan Harga Sultra Terendah Secara Nasional



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menorehkan sejarah baru, di-

mana Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sultra menjadi yang terendah secara nasional. Hal ini terungkap dari data BPS

yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara hybrid, Senin (06/05/24).

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



DPRD dan Pemkot Baubau Mulai Bahas Rencana Merger OPD

Nur Gemilang Siraja, SIP (Hanura); Rosni, SE., (PBB); La Ode Hadia, S.Sos., M.Si (Gerindra). Muh. Ahadiyat Zamanai, ST., MT (Nasdem) dan Ardin Jufri, ST (Golkar) beserta jajaran Pemkot yang dipimpin Plh. Sekda La Ode Aswad, S.Sos, M.Si beserta pimpinan OPD, jumat kemarin (3/5) hingga jelang malam membahas serius penggabungan OPD.

meminta Pemkot Baubau benar-benar rinci dan teknis dalam menghitung dampak-dampak yang timbul dari penggabungan OPD tersebut, seperti distribusi jabatan struktural, hingga distribusi tenaga magang yang selama ini mengabdikan pada OPD yang akan di merger. Beberapa anggota dewan berpendapat, jika sumberdaya pengelola lemah, maka sistemnya diperbaiki, bukan "rumahnya" yang dihilangkan.

Dirilis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si pagi ini, Plh. Sekda La Ode Aswad menyatakan pihaknya telah memberi pertimbangan matang dengan upaya merger yang semata diarahkan untuk efektifitas pengelolaan pemerintahan di daerah. Namun begitu pihaknya tetap sangat terbuka dalam menerima berbagai masukan dari berbagai pihak termasuk

skoring pencapaian kinerja per OPD.

Beberapa pembahasan DPRD yang jadi fokus dan cenderung diminta untuk dipertahankan, adalah keberadaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) yang masih dinilai sangat strategis, karena berkaitan dengan PAD serta pembinaan kependudukan dan prestasi olahraga daerah, baik dalam skala regional dan nasional. (*)

Pemda Buton Kembangkan Jeruk Siompu

paten Buton, Aula Kantor Bupati Buton, Kamis, 2 Mei 2024

Kegiatan ini dirangkikan dengan penyerahan secara simbolis 70 bibit Jeruk Keprok Siompu kepada Para Kepala Desa di Kecamatan Wabula.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si selaku pimpinan daerah menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya penyelamatan Jeruk Keprok Siompu dari ancaman kepunahan

"Menurut hemat kami kegiatan hari ini sangat strategis di tengah kekawatiran kita semua atas ancaman kepunahan Jeruk Siompu di Kepulauan Buton," ungkapnya.

Seperti kita ketahui bersama, lanjut Pj. Bupati Buton, bahwa Jeruk Siompu merupakan jenis tanaman hortikultura unggulan nasional dimana Jeruk Siompu pernah dinobatkan sebagai jeruk termanis di Indonesia, namun akhir-akhir ini produksi buah Jeruk Siompu terus mengalami penurunan yang signifikan

"Oleh karena itu upaya penyelamatan dengan program penanaman bibit jeruk yang berkualitas terutama yang dibekali dengan pupuk hayati mikoriza di luar pulau siompu khususnya di Kabupaten Buton perlu dilakukan," tuturnya.

Hal ini didukung dengan

hasil studi yang dilakukan tim peneliti dari AMI yang didanai oleh Pemda Buton tahun 2023 menyimpulkan bahwa bibit bermikoriza memiliki performa pertumbuhan lebih baik dibanding bibit tidak bermikoriza

Terlebih hal ini juga sejalan dengan program nasional Kementerian Pertanian RI terkait penyelamatan sumber daya genetik lokal dan pengembangan tanaman pangan yang prospek dan bernilai ekonomi

Dalam kesempatan yang sama Ketua umum AMI, Prof. Dr. Ir. Husna, MP mengungkap kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Balitbang Buton dan AMI

"Kita patut bersyukur karena kita dikaruniai tanaman Jeruk Siompu karena jeruk ini sudah dinobatkan menjadi jenis jeruk termanis di Indonesia oleh Menteri pertanian RI," ungkapnya.

Ia mengatakan 10 sampai 20 tahun terakhir Jeruk Siompu terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari hasil riset yang telah dilakukan.

"Berdasarkan hasil riset kami pada tahun 2022 ternyata masalah utama yang dihadapi petani Jeruk Siompu adalah banyaknya pohon jeruk yang diserang hama dan penyakit Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD) yang sampai saat ini belum ada obatnya di Indonesia," jelasnya.

Ia menambahkan ada upaya pengembangan skala besar jeruk siompu di luar pulau Siompu hingga di luar pulau Buton.

"Pada tahun 2023 lalu akhirnya kita coba tanam jeruk siompu di Mawasangka Buton Tengah sebanyak 300 bibit jeruk yang dibekali dengan pupuk hayati mikoriza sebagai upaya menyelamatkan bibit Jeruk Siompu dari kepunahan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Balitbang, Wa Ode Sitti Raymuna, SE, M.Si, mengatakan penelitian dengan penerapan inovasi atau teknologi ramah lingkungan berupa pupuk hayati mikoriza pada sektor pertanian skala luas telah lama dilakukan.

"Berbagai riset internasional maupun nasional termasuk riset yang dilakukan oleh ibu ketua AMI bersama peneliti membuktikan bahwa aplikasi pupuk hayati mikoriza mampu meningkatkan pertumbuhan bibit jeruk baik pada skala persemaian maupun dilapangan," bebernya.

Pihaknya berharap bahwa bibit yang telah dibekali pupuk hayati mikoriza dapat diuji coba pada skala lapangan khususnya di Kabupaten Buton.

"Harapan kami output dari riset adalah terbangunnya plot penanaman jeruk berbasis mikoriza

di Kabupaten Buton dan terselamatkan material jeruk Siompu dari kepunahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Butonm," ungkapnya.

Selanjutnya aksi penanaman 150 pohon bertempat di halaman kantor BPP Kecamatan Wabula oleh Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi Ketua AMI dan tim peneliti, Dirut Bank Sultra Kabupaten Buton, dan para kepala OPD lingkup Pemda Buton, Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Wabula.

Usai melakukan aksi penanaman Jeruk Siompu, Pj. Bupati Buton di hadapan awak media menyampaikan harapannya semoga jangan hanya komoditas jeruk tapi juga komoditas-komoditas unggulan lainnya yang ada di Buton ini bisa terselamatkan dari ambang kepunahan misalnya Kopi Kaongke-ongkea, opa sejenis umbi-umbian dan lainnya.

"Namun yang menjadi perhatian saat ini adalah penanaman Jeruk Siompu, Pemda tidak memiliki tanah berhektar-hektar untuk di tanami Jeruk Siompu jadi saya berharap camat dan kades bisa menginventarisasi tanah-tanah masyarakat untuk bisa ditanami Jeruk Siompu," pungkasnya. (*)

Toreh Sejarah Baru, Indeks Perkembangan Harga Sultra Terendah Secara Nasional

Data pada minggu pertama Mei 2024 menunjukkan angka IPH Provinsi Sultra alami penurunan yang cukup signifikan, yaitu -1,62%. Angka IPH tersebut adalah terendah secara nasional, yang menandakan stabil dan terkendalinya inflasi di Provinsi Sultra.

Dalam Rakor tersebut, Provinsi Sultra di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Sultra mendapat apresiasi dari Irjen yang juga Plt Sekjen Kemendagri Tomsu Tohir atas kinerja dan upaya yang telah dilaksanakan guna mengendalikan angka inflasi dan IPH di Sultra. "Kita tentu sangat mengapresiasi Pj Gubernur Sultra karena mampu mengendalikan angka inflasi dan IPH sehingga tetap terjaga dan terkendali utamanya pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri," kata Tomsu Tohir pada Rakor Pengendalian Inflasi.

Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Andap juga tercatat sebagai Pemerintah Daerah yang menginisiasi penandatanganan komitmen bersama TPID Provinsi, 15 Pemda Kabupaten dan 2 Pemda Kota, BPS (Badan Pusat Statistik), Bank Indonesia dan Buletlog pada tanggal 16 November 2023 lalu sebagai langkah awal menurunkan angka inflasi di Sultra.

Menindaklanjuti komitmen bersama tersebut, Pj Gubernur Sultra menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.

"4K Tata Kelola dan Niaga Pangan yang kami implementasikan, Alhamdulillah berhasil menghantarkan kami menjadi Provinsi dengan IPH terendah secara nasional. Semua ini tercapai berkat kerjasama yang baik diantara kita" ujarnya.

Selama periode Januari hingga April 2024, Pj Gubernur juga menggalakan pelaksanaan program pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh Kabupaten/Kota di Sultra yang melibatkan berbagai instansi terkait.

"Selama periode Januari hingga April 2024, Pemprov Sultra telah melaksanakan pasar murah sebanyak 212 kali di 17 Kabupaten/Kota se-Sultra," ungkap Pj Gubernur.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan semangat gotong royong, baik oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, Biro Ekonomi Setda bersama dengan Dinas lainnya serta Instansi atau stakeholder lainnya," tambahnya.

Andap memilih respon cepat dengan kerja konkret di lapangan dalam menyikapi isu inflasi Sultra, terutama inflasi pangan yang selama ini menjadi salah satu catatan negatif bagi Sultra.

"Komoditas pangan yang memberi andil IPH Sultra yakni beras, daging, ayam dan cabai merah," papar Andap, "dari 13 Kabupaten/Kota non Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra, 11 diantaranya alami deflasi."

Dalam keterangan selanjutnya, Andap menjelaskan IPH tertinggi di Sultra terjadi di Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,90%, sedangkan Kabupaten den-

gan IPH terendah berada di Kabupaten Bombana yang alami deflasi sebesar -2,91% disebabkan penurunan harga beras, cabai merah dan tempe.

Variasi dalam perubahan harga di berbagai wilayah Sultra mencerminkan kompleksitas ekonomi lokal dan mempengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi. Meskipun tercatat adanya pencapaian positif dalam pengendalian inflasi dan IPH, namun Andap mengingatkan kepada TPID untuk tidak berpuas diri dan tetap waspada.

"Isu pangan akan menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental. Situasi geopolitik perlu juga dicermati bersama pengaruhnya terhadap pangan nasional, khususnya di Sultra," kata Andap, "Mari kita terus mengharmonisasikan gerak dan langkah dalam memberikan pelayanan publik atas ketersediaan pangan yang aman, cepat dan terjangkau, termasuk dalam momentum jelang Pilkada Serentak November 2024"

"Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," kata Andap.

Terakhir, Pj Gubernur selaku ketua TPID menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja TPID, stakeholder terkait, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergandengan tangan menghadapi masa-masa sulit pasca pandemi Covid-19, El Nino berkepanjangan, dan bencana hidrometeorologis basah berupa banjir yang terjadi di Bumi Anoa. (*)

Pemkot Baubau Surati Pj Gubernur Terkait Berakhirnya Masa Jabatan Pj Sekda

akhir tanggal 6 Mei 2024.

Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si ketika ditemui di ruang kerjanya Senin (6/4/2024) mengatakan, maksud Pemkot Baubau menyurati Pj Gubernur Sultra agar jangan sampai terjadi kevakuman sehingga langsung diantisipasi Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si yang bersurat ke Pj Gubernur Sultra. Namun demikian, belum bisa dipastikan kapan keluar Keputusan Gubernur Sultra berkaitan dengan Pj Sekda Kota Baubau yang berikutnya.

â€œTerkait dengan kelan-

jutanya, ya kita kembalikan kepada pimpinan dalam hal ini pak wali sebagai pemakai dan kemudian pak gubernur sebagai yang memberikan perintah untuk melaksanakan tugas itu,â€œ ujar Saido Bonsai.

Ditambahkan, sebagai Aparatur Sipil Negara, pihaknya harus loyal. Artinya, apa yang diarahkan atau di perintahkan pimpinan itu harus dijalankannya. Pasalnya, tidak semua orang bisa diberi kepercayaan itu, seperti jabatan Sekda, walaupun sifatnya hanya sebagai penjabat. tapi penjabat ini kewenan-

gannya sama dengan yang definitif dalam hal mengatur terkait dengan manajemen kepegawaian semua kewenangan itu tidak ada bedanya dengan yang definitif.

Saido Bonsai mengungkapkan, siapa pun bisa menjalankan tugas-tugas penjabat Sekda.

â€œ Saya siap saja, apakah mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan lagi. karena semua sudah di atur di peraturan pemerintahan yang ada seperti Pj Sekda ini sudah di atur dengan Perpres Nomor 3 tahun 2018, kemudian peraturan Mendagri No.91 tahun 2019,â€œ tutupnya. (*)

Mendagri Instruksikan Pemda Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dukung Forum Air Sedunia Ke-10

(Pemda) dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Forum Air Sedunia ke-10.

Instruksi yang dialamatkan kepada gubernur dan bupati/wali kota tersebut terbit dalam rangka mewujudkan ketahanan air, serta ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Di dalamnya terdapat sejumlah poin penting yang perlu dilakukan oleh Pemda.

Pertama, Pemda diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air yang berorientasi mewujudkan ketahanan. Hal itu meliputi peningkatan kualitas air, konservasi dan pemulihan ekosistem air tawar dan keanekaragaman hayati, penghematan dan efisiensi air, hingga penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman untuk masyarakat sebagai hak asasi

manusia yang utama.

â€œTermasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah dan limbah padat serta pelayanan kebersihan di perkotaan, penyediaan air untuk pangan/pertanian, dan pemanfaatan sumber daya air untuk energi,â€œ demikian bunyi Inmendagri tertanggal 3 Mei 2024 tersebut.

Kedua, Pemda diminta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola, kerja sama, dan diplomasi air. Upaya ini melalui peningkatan dialog, kerja sama, partisipasi, dan koordinasi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, lintas batas wilayah sungai, danau, lahan basah (gambut/ rawa), pulau-pulau kecil, serta akuifer air tanah. Sedang upaya lainnya melalui pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung tata kelola air di wilayah masing-

masing.

Selain itu, Pemda perlu mengembangkan institusi dan penegakan kerangka hukum yang transparan dan akuntabel. â€œSerta peningkatan integritas dan penguatan, kesetaraan gender, keterlibatan pemuda, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan komunitas lokal/masyarakat adat,â€œ sambungnya.

Ketiga, Pemda diimbau untuk mewujudkan ketangguhan bencana hidrometeorologi melalui kebijakan dan program pencegahan serta pengelolaan banjir yang terpadu. Hal ini meliputi mitigasi kejadian cuaca ekstrem, pengendalian banjir, perlindungan zona pesisir, penanganan sedimentasi, dan pengembangan sistem peringatan dini.

Selain itu Pemda perlu menerapkan kebijakan dan program pencegahan dan program pengendalian. Langkah ini

melalui penyusunan rencana adaptasi, pemilihan tanaman tahan kekeringan, serta restorasi lahan gambut dan bakau. Program lainnya, penerapan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem melalui restorasi dataran banjir dan hutan bakau serta infrastruktur hijau, juga perlu dilakukan.

â€œPeningkatan ketahanan infrastruktur air terhadap kejadian cuaca ekstrem, dan pengembangan sistem peringatan dini, termasuk rencana kesiapsiagaan dan analisis skenario bencana, serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana,â€œ lanjutnya.

Keempat, dukungan Pemda ini juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan didukung alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan investa-

si pembiayaan infrastruktur kebencanaan.

Tak hanya itu, terbitnya Inmendagri ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Forum Air Sedunia (World Water Forum) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang. Karena itu, Pemda diminta untuk mendukung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 tersebut melalui publikasi secara masif dan serentak di dae-

rah sejak April 2024 hingga 31 Mei 2024.

Adapun publikasi tersebut dilakukan melalui website, media sosial, videotron, baliho, dan berbagai kanal informasi publik yang dikelola oleh Pemda dengan menggunakan tagar resmi #Waterforsharedprosperity. Untuk materi publikasi dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/MateriPro>

mosi10thWWF. Sedangkan terkait hasil penayangan materi, Pemda diminta untuk mengunggah bukti tayang pada tautan <https://s.id/BuktiTayangPemda>. Terakhir, Pemda diminta untuk melaporkan pelaksanaan instruksi tersebut kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda). (*)

Pj Bupati Buton La Ode Mustari Sampaikan LKPJ di DPRD



Pj Bupati Buton La Ode Mustari

Perwarta: Rahman

BAUBAU, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari M.Si membacakan pidato penjelasan Kepala Daerah Kabupaten Buton tentang laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buton terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton di Aula Kantor DPRD Kabupaten Buton, Pasarwajo, Senin 29 April 2024.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd.,MSi, Wakil Ketua I La Ode Rafiun, Unsur Forkompinda Kabupaten Buton yang dihadiri Wakapolres Kopol Aslim SH. MH,

Kasi Intel kejaksaan negeri Buton Norbertus Dhendry Restu Prayogo, S.H.,M.H., Danramil 1413-02/Pasarwajo Kapten Arm. La Bondo, dan Para Staf ahli, Asisten juga Para Kepala OPD Lingkup Pemda Kabupaten Buton.

Dalam penyampaian Pidatonya Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton, terutama atas dukungan, harmonisasi dan kerja samanya sehingga sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif terhadap seluruh jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buton berjalan dengan baik selama tahun anggaran 2023 yang lalu.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buton ini, sebagai amanat konstitusi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sidang paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Oleh karena itu dengan keterbatasan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Buton ini, sehingga tidak memungkinkan menunggu proses dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023, maka perlu kami sampaikan bahwa kondisi laporan keuangan APBD yang digunakan dalam LKPJ Tahun 2023 ini masih dalam status belum teraudit.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2023

telah dilaksanakan dengan penuh dramatis Bertagat tantangan dan hambatan juga dihadapi Kekuatan pendapat daerah sebagai sumber energi, menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan tersebut Pendapatan daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita sekaligus untuk menjawab permasalahan pembangunan.

Pemanfaatan potensi aset dan SDA tentunya kita akan berupaya pula penggalian potensi penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan jasa, dengan melakukan langkah-langkah pertertiban dan perbaikan administrasi, penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah yang masih perlu ditingkatkan Peningkatan penerimaan daerah tersebut merupakan suatu keharusan untuk memperkuat kemandirian anggaran dan ekonomi daerah.

Dengan cara itulah, secara bertahap kita dapat menjawab tantangan pembangunan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Buton ditahun 2023 melaksanakan 21 urusan wajib, 6 urusan pilihan dan 6 urusan pemerintahan fungsi penunjang, yang terbagi atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur

pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum.

Kita menyadari semakin kompleksnya permasalahan dan tingkat pengawasan yang ada di negeri kita, Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu pemicu kompleksitas permasalahan tersebut. Untuk itu kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Perubahan cara pikir dan bertindak serta profesionalitas ASN sangat dibutuhkan. Kerja bersama dan sama-sama bekerja merupakan suatu keniscayaan. Pengawasan yang terarah dan terukur dari Dewan yang terhormat juga menjadi salah satu unsur pemicu keberhasilan yang kita capai, dan atas nama Pemerintah Daerah, Saya ucapkan banyak terima kasih.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat, semoga ke depannya akan terus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, melalui forum yang mulia ini kami mohon pandangan, saran dan masukan yang konstruktif dari Rekomendasi yang disampaikan nantinya oleh DPRD merupakan catatan penting yang dapat dijadikan masukan sebagai perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang. (*)

Respons Gibran Usai Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic

Laporan: Listar

SOLO-Wakil presiden terpilih Gibran Raka-buming Raka merespon Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak mengajak orang toxic ke pemerintahan.

Gibran mengaku tidak tahu siapa orang yang dimaksud Luhut agar tidak diajak ke dalam pemerintahannya bersama Prabowo.

"Spesifiknya siapa? Tanyakan Pak Luhut ya. Saya kan nggak tahu yang dimaksud toxic siapa," kata Gibran usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo, Senin (6/5).

Gibran yang juga Wali Kota Solo itu mengaku terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Ia mengingatkan sejak awal pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen akan merangkul kubu-kubu yang bertarung dengannya di Pilpres 2024.

"Saya kira semua yang ada di dalam pemerintahan, yang ada di luar koalisi, ataupun mantan-mantan kontestan siapapun berhak kok memberikan masukan," katanya

Gibran mengatakan selama ini selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Termasuk dengan mereka yang berseberangan dengannya di Pilpres 2024 lalu.



"Kalau saya kan berkawan dan berteman dengan semua. Di dalam koalisi, luar koalisi, semua saya jadikan teman, saya jadikan guru," katanya.

Luhut sebelumnya memberi pesan kepada Prabowo agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan.

Pernyataan itu Luhut sampaikan saat bicara dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5).

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," kata Luhut.

Luhut mengaku telah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Luhut mengatakan bahwa masalah pemerintah adalah regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Banyak yang harus dibenahi.

Ia menyebut solusinya

adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karenanya, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi. Jika ada orang yang tidak setuju dengan itu, jelas Luhut, akan menghambat kemajuan.

Selain itu, Luhut juga mengaku pernah memberi saran kepada Jokowi agar mengganti orang-orang yang tidak setuju.

"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,'" jelas Luhut.

Luhut pun berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Jangan sampai kemajuan Indonesia terhambat oleh orang di dalam pemerintahan itu sendiri. (*)

Tito Sentil Pemkab Mimika: APBD Rp 8 Triliun Tapi Kemajuan Tak Banyak

Laporan: Listar

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyentil Pemda Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang wilayahnya tak kunjung mengalami kemajuan berarti padahal sudah memiliki total APBD sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun untuk warganya yang sekitar 200 ribuan.

"Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau Rp8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi," kata Tito dalam Musrenbangnas 2024 yang digelar Bappenas, Senin (6/5).

Tito menilai kondisi tersebut dapat terjadi lantaran belanja APBD yang dilakukan Pemda Mimika tak efektif dan efisien.

Terlebih lagi, ia menyinggung banyak daerah yang rasio sumber pendapatan keuangan daerahnya mayoritas masih mengandalkan transfer dari pusat ketimbang dari pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau daerah trans-fernya andalkan pusat,

duitnya abis buat belanja pegawai, yang untuk masyarakat enggak sampe juga. Sebagian bocor," kata Tito.

Karena itu, ia menjelaskan konsep menyusun perencanaan jangan semata untuk menghabiskan APBD. Melainkan memikirkan cara supaya postur PAD meningkat melalui mekanisme perencanaan dalam APBD.

Tito menilai daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup. Sebab, salah satu pemasukan PAD berasal dari retribusi pajak.

Sebaliknya, ia menilai pemerintah daerah jangan pernah mimpi untuk memajukan daerahnya jika rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) cuma 20 persen dan lebih banyak transfer dari pusat.

"Ini yang harus diubah menyusun perencanaan. Ini untuk mancing swasta bisa hidup dan PAD bisa naik. Kalau PAD bisa naik, saudara punya banyak uang," kata dia. (*)

"Maka tolong rekan-rekan kuncinya menghidupkan swasta. Kalau ingin hidupkan swasta makan buatlah program untuk swasta hidup. Mulai masalah perizinan, lahan rtrw. Rdtr. Itu dikerjakan betul. Dan buat birokrasi mudah agar swasta hidup," tambahnya.

Tito lantas menyarankan daerah supaya mempergunakan APBD untuk mancing pihak swasta bangkit. Baginya, APBD tak akan pernah sejahtera akan rakyat jika jumlahnya kecil dan masih banyak mengandalkan transfer dana dari pusat.

"Ini yang harus diubah menyusun perencanaan. Ini untuk mancing swasta bisa hidup dan PAD bisa naik. Kalau PAD bisa naik, saudara punya banyak uang," kata dia. (*)

<https://www.baubaupost.com>

Rabu, 08 Mei 2024

Sekda Sultra Asrun Lio Melepas KRI Marlin 788 ERB ke Wakatobi dan Pulau Runduma



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Pj. Gubernur Sultra diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D, secara resmi melepas Kapal KRI Marlin-877 yang membawa Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) di Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko dan Runduma. Ekspedisi Rupiah ini adalah mitra kerjasama antara TNI AL dengan Bank Indonesia (BI). Acara ini dilaksanakan di Mako Lanal Kendari, Jum'at, 03 Mei 2024.

Hadir dalam acara Pelepasan tersebut Forkopimda Tk. I Prov. Sultra, Perwakilan Mabes TNI AL Kendari, Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, Kepala Perwakilan BI Prov. Sultra, Para Komandan TNI Sultra, Kelapa OJK Wilayah Prov. Sultra dan Tim Onboard Ekspedisi RB Sultra yang berasal dari berbagai kantor Perwakilan BI.

Kegiatan ekspedisi, sudah kedua kali dilaksanakan di provinsi Sultra, kurun waktu yang cukup lama pada ekspedisi pertama. Tugas berat ini akan terus dilakukan yaitu pendistribusian uang, pengedaran uang ke seluruh wilayah dengan berbagai cara, tentu saja strategi ingin dicapai tersebut adalah amanat yang tidak ringan.

Dibutuhkan kerjasama dengan

berbagai pihak di wilayah-wilayah luar, bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang memiliki sarana dan prasarana, lembaga atau distribusi yang memang memiliki kesamaan Visi dan Tujuannya yang sama. TNI Angkatan Laut, sudah sangat lama menjalin kerjasama yakni dari tahun 2012.

Ditempat yang sama, Sekda Sultra dalam sambutan Pj. Gubernur mengatakan bahwa, "pada hari Jum'at yang bisa kita sebut dengan Sayyidul Ayyam (penghuluannya hari) sehingga hari jumat adalah hari kebaikan, keistimewaan dari hari-hari yang lain, sehingga pada hari ini hari yang istimewa untuk ERB Sultra, Maimo cinta rupiah ini bahasa pulau terlaksana".

Atas nama Pemprov. Sultra mengucapkan teri-

makasih dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ERB pada hari ini dan kegiatan ini berlangsung masih dalam suasana HUT Prov. Sultra yang ke-60, lanjutnya.

Pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat ini tentunya tidak hanya menjadi perjalanan fisik dalam mengedarkan uang layak edar kepada masyarakat Indonesia, tetapi juga menjaga perjalanan nilai-nilai keberdaulat rupiah.

Dengan peningkatan distribusi uang layak edar, kami berada ekstensi rupiah sebagai simbol keadulatan dapat terus terjaga, hingga ke pulau terjauh Wakatobi yaitu pulau Runduma. sebagai strategi untuk menjaga kelayakan rupiah secara berkelanjutan, diperlukan edukasi cinta bangga paham rupiah agar seluruh masyarakat dapat

berpartisipasi aktif dalam menjaga keadulatan rupiah dan memastikan kelancaran berputaran roda ekonomi.

Terakhir, sebagai arahan dari bapak Pj. Gubernur Sultra, dikatakan "mari kita bersama-sama memastikan bahwa tujuan dari ekspedisi rupiah berdaulat Maimo cinta rupiah ini tercapai dengan baik. Mari kita jaga berkeadulatan rupiah dengan penuh kebanggaan dan tanggungjawab".

Kemudian, Penyerahan cendramata dari Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Perwakilan Bank Indonesia Sultra dan TNI AL kepada Sekda Sultra dan begitu juga sebaliknya, yang diikuti oleh acara berikutnya; Sekda Sultra penyematan rompi secara simbolis kepada tim ERB dan menyempatkan lakukan kunjungan dikapal KRI Marlin dan agenda terakhir adalah pelepasan tali tambat sebagai tanda jalan kapal KRI Marlin lepas landas dari pelabuhan. (*)

2029. Tema "Sinergi bersama bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara"

Hadir pada acara tersebut, antara lain; Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Japnas, Ketua Harian PP Japnas, Ketua Koni Sultra, Perwakilan Kadin Sultra, Kadis Kominfo Sultra diwakili Sekdis, Para Dewan Pengurus dan Anggota Japnas se-Sultra

Pembacaan Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional tentang Kepengurusan Kewilayahan Japnas Prov. Sultra masa bhakti 2024-2029 oleh Ketua Harian Japnas Pusat, Widianto Saputro dengan SK Nomor: 107/SKPJapnas/V/2024, tentang Pengesahan Pengurus Wilayah

Jaringan Pengusaha Nasional Prov. Sultra masa bhakti 2024-2029, dengan Sania Kartika Sandy, SE di tunjuk sebagai Ketua Umum PW. Japnas Prov. Sultra.

Sania Kartika Sandy, mengucapkan terima kasih atas kesempatan ditunjuk sebagai Ketua Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masa bhakti 2024-2029.

Japnas Sultra saat ini telah memasuki masa kepengurusan yang kedua, masih sangat mudah keberadaannya di Sulawesi Tenggara. Saat ini Japnas Sultra, sudah terbentuk 4 (empat) Pengurus Cabang dari Kabupaten/Kota yaitu; Pengurus Cabang (PC) Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara dan

Kab. Kolaka. Saat ini Pengurus se-Sultra beranggotakan kurang lebih 400 anggota.

Tugas Ketua Umum Japnas Sultra bertekad segera akan membentuk pengurus cabang di seluruh Kab/Kota di Sulawesi Tenggara, sehingga tercipta identitas pengusaha dan mendorong masyarakat untuk lebih menjadi pengusaha.

Ditempat yang sama, Kadis DPM-PTSP Sultra, yang mewakili Bapak Pj. Gubernur mengatakan bahwa, selaku pemerintah Prov. Sultra Japnas adalah Mitra yang akan bersinergi membangun Sultra, tuturnya.

Selain itu juga, betapa besarnya kebutuhan ekonomi di Sultra, sehingga



DPMPTSP yang mengelola investasi di Prov. Sultra membuka pintu bagi pengurus Japnas untuk berinvestasi membangun daerah, lanjutnya.

Kepala DPMPTSP Sultra ini juga menyebutkan bahwa, realisasi investasi yang pernah di capai oleh Pemprov. Sultra pada tahun 2021 menembus angka 21,13 Triliun, hal ini sangat dipengaruhi

oleh kegiatan-kegiatan investasi yang cukup besar seperti hadirnya PT. Virtue Dragon dan PT OSS yang ada di Morosi, jelasnya.

Lanjut disampaikan, dalam waktu dekat akan segera bergerak melakukan kegiatan investasi yang cukup besar di Sultra, tepatnya di Kab. Kolaka yaitu PT. Valen dan IPIP. Diharapkan Japnas

setiap saat berdiskusi dan berkolaborasi dengan Pemprov. Sultra melalui DPMPTSP sebagai mitra. Dikatakan, kapan saja untuk berdiskusi tentang investasi utamanya pada kegiatan UMKM, Pemprov selalu siap, sehingga kehadiran Japnas dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan Badan Usaha lainnya yang ada di jazirah Sultra. (*)

Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional Provinsi Sultra Dikukuhkan

Pewarta: Amran

SULTRA, BP-Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha

Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dikukuhkan oleh Pj. Gubernur Sultra yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov.Sultra), Parinringi, SE di Hotel Claro Kendari, Senin 6 Mei 2024.

Acara Pengukuhan/pelantikan tersebut masa bhakti 2024-

Pemda Buton Gelar Upacara Hari Pendidikan Nasional, Pj Bupati Jadi Irup



Laporan: Andina L

BUTON. BP-Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melaksanakan Upacara Hari Pendidikan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otodas) Tingkat Kabupaten Buton, juga sekaligus penyerahan berbagai penghargaan bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik berprestasi di Alun-alun Takawa, Kamis 2 Mei 2024.

Penyerahan piagam penghargaan diserahkan kepada program sekolah penggerak angkatan 3 yaitu TK Kombeli dan SDN 45 Buton, dan penyerahan piagam penghargaan untuk tenaga pengajar Smart Gasing di luar wilayah Buton atas nama Wa Ariana (SDN 21 Buton), Nurmalita (SDN 42 Buton), Safiru Hunas (SDN 42 Buton), Titin Usmar (SDN 52 Buton), La Ode Sunarno (SDN 35 Buton), La Samaudin (SDN 65 Buton).

Upacara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Anggota Forkopimda Kabupaten Buton, dan Para Asisten dan Kepala OPD Lingkup

Pemda Buton, juga Para Kepala Sekolah Se-kabupaten Buton.

Kemudian diikuti oleh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, guru, dan peserta didik tingkat SD, SMP hingga SMA.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari M.Si membacakan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan bahwa lima tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek.

Menjadi pemimpin dari gerakan merdeka belajar semakin menyadari kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar dan bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran.

Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan

tantangan yang tak pernah terbayangkan yakni pandemi.

Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat.

Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini, kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi disekitar kita, merasakan digerakan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak, wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan merdeka belajar.

Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas, kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapat kepercayaan untuk mengenal dan menilai muridnya, kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak

lagi terbatas di dalam kampus dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seni-man dan pelaku budaya terus di dukung untuk berekspresi.

Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan merdeka belajar, namun lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh, semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan kearah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan.

Saya sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang ibu dan bapak lakukan dengan penuh harapan, saya titipkan merdeka belajar kepada anda semua para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan.

selamat hari pendidikan nasional. mari terus bergotong royong menyemarakkan dan eqqm lanjutkan gerakan merdeka belajar. (*)

Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Resmi Diluncurkan Presiden Joko Widodo



Laporan: Andina L

JAKARTA, BP-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan (hospital based) pada Senin (6/5). Peluncuran ini berlangsung di RSAB Harapan Kita, Jakarta.

Program Ini menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk. Rasio tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-147 di dunia.

Saat ini, jumlah dokter umum di Indonesia hanya sebanyak 156.310 per 1.000 penduduk, Indonesia masih kekurangan 124.294 dokter umum. Rata-rata, terdapat sekitar 12.000 lulusan setiap tahun dari 117 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.

Sementara itu, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670. Menurut Bappenas, rasio ideal dokter spesialis, yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Dengan demikian, Indonesia masih kekurangan 29.179 dokter spesialis. Rata-rata, terdapat sekitar 2.700 lulusan setiap tahun dari 24 fakultas ke-

dokteran penyelenggara pendidikan dokter spesialis saat ini.

Selain itu, distribusi dokter spesialis juga tidak merata. Sekitar 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Oleh sebab itu, saat ini harus ada terobosan, kita harus membuat terobosan, kita harus berani memulai. Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional,” tutur Jokowi.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin mengatasi masalah utama yang belum terselesaikan selama 79 tahun, yakni distribusi dokter yang tidak merata.

Karena itu, Kemenkes merumuskan kebijakan rencana 15 tahun kedepan, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.

“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata Menkes Budi. (*)

Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dengan hospital base bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.

“Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujar Menkes Budi.

Dari sisi kualitas, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia. Pasalnya, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.

“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata Menkes Budi. (*)

Harian Pagi
Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky TA
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Dewas KPK: Alexander Marwata Sudah Diperiksa, Tapi Tak Ada Pelanggaran



Dewas KPK periksa Alexander Marwata terkait kasus Nurul Ghufron mutasi pegawai Kementan.

Laporan: Hamid

JAKARTA- Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Harjono mengatakan pihaknya telah memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam dugaan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Dari pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan Alex.

sidang terhadap Ghufron.

"Nanti diberi tahu ada pemberitahuan kalau ada enggak hadir tanggal itu, sidang dilanjut," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

"Ya nanti kita rapatkan, majelis akan rapat nanti. Kalau dia (Ghufron) enggak datang. Oh, kita gelar," ucapnya.

Di sisi lain, Tumpak mengatakan Dewas tidak memperlakukan jika nantinya gugatan Ghufron yang sebelumnya diajukan oleh Ghufron, diterima PTUN.

"Ya enggak apa-apa, itu kan berlaku ke depan," katanya.

Sebelumnya, Nurul Ghufron selaku pimpinan KPK berlatar belakang akademisi disangka melanggar kode etik terkait den-

gan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) RI berinisial ADM.

Ghufron telah buka

suara soal perkara mutasi itu. Awalnya, ia menerima pengaduan dari seorang kenalan-nya terkait permohonan mutasi ASN Kementerian Pertanian. Namun, permohonannya tak berjalan mulus. Kenalan Ghufron merupakan ibu mertua dari ASN yang ingin mutasi.

"Saya menerima aduan dari seseorang ibu yang memiliki menantu pegawai di Irjen Kementan. Itu pada awal-awal Maret (2022), intinya laporannya adalah meragukan mengajukan diri untuk minta mutasi sejak hamil sampai kemudian melahirkan 1 tahun 7 bulan. Jadi sekitar 2 tahun, itu tapi tidak dikabulkan," tutur Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (2/5).

Ghufron menyebut alasan ASN tersebut tidak diizinkan mutasi ke daerah lantaran akan mengurangi SDM yang ada di pusat. Namun, saat ASN itu mengajukan surat pengunduran diri, ternyata

diterima. Hal tersebut dinilai tidak konsisten. Sebab, mutasi ataupun mengundurkan diri itu sama-sama akan mengurangi SDM di posisi yang bersangkutan.

Usai mendapat pengaduan itu, Ghufron mengaku diskusi dengan Pimpinan KPK lain, yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alasan Ghufron berdiskusi karena Alex disebut sebagai pimpinan yang datang paling pagi ke kantor. Sehingga, Ghufron pun biasa berbincang dengan Alex sebelum kegiatan kantor berjalan.

Ghufron menyebut Alex menceritakan kasus-kasus lain yang pernah ditangani. Alex disebut turut menegaskan bahwa sang ASN yang mengajukan mutasi itu mesti memenuhi syarat.

"Baru setelah kemudian pak Alex mengoke, asalkan katanya pak Alex, asalkan pemohon mutasi tersebut memenuhi syarat, tidak kemudian tidak memenuhi syarat kemudian diendorse untuk memenuhi syarat. Itu yang disampaikan pak Alex," kata Ghufron. (*)

"Iya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

Jakarta Pusat, Senin (6/5). "Apakah saksi juga pernah melakukan pembayaran pembelian lukisan pak menteri?" tanya jaksa KPK.

"Ya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

Jakarta Pusat, Senin (6/5).

"Apakah saksi juga pernah melakukan pembayaran pembelian lukisan pak menteri?" tanya jaksa KPK.

"Iya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

"Ya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

"Ya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

"Ya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

Polri Sita Aset Jaringan Narkoba Fredy Pratama Total Rp432 Miliar

Laporan: Hadi

JAKARTA- Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri telah menyita aset jaringan narkoba internasional Fredy Pratama total senilai Rp432,2 miliar.

Ketua Satgas P3GN Polri Irjen Asep Edi Suheri mengatakan penyitaan dilakukan dari hasil penelusuran aliran dana narkoba milik Fredy beserta dari tangan anak buah yang sudah ditangkap.

"Untuk total penyitaan aset dari jaringan narkoba Fredy Pratama hingga saat ini terhitung senilai Rp432,20 miliar," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/5).

Asep menjelaskan hingga saat ini polisi telah menangkap total 60 jaringan narkotika

Fredy Pratama yang ada di Indonesia.

Ia mengatakan penangkapan terakhir dilakukan Bareskrim Polri terhadap empat kaki tangan Fredy saat mengungkap kasus laboratorium narkoba di Sunter, Jakarta Utara.

Lebih lanjut, Asep mengatakan dari total 60 anak buah Fredy Pratama yang telah ditangkap, 45 berkas di antaranya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan tinggal menunggu persidangan.

"Untuk P-19 atau kelengkapan berkas perkara sebanyak 1 tersangka atas nama Bayu Firmandi dan proses penyidikan sebanyak 14 orang," tuturnya.

Bareskrim Polri telah mengungkap bandar besar narkotika jaringan internasional

Fredy Pratama alias Miming alias Casanova. Bareskrim menyita total sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi jaringan Fredy di Indonesia selama periode 2020-2023.

Berdasarkan barang bukti yang ada, Fredy disebut masuk sebagai salah satu sindikat penyalur narkotika terbesar di Indonesia. Dari hasil analisa Direktorat Tindak Pidana Narkoba didapatkan bahwa mayoritas narkotika di Indonesia terafiliasi dengan jaringan Fredy.

Setiap bulan, sindikat Fredy disebut mampu menyelundupkan sabu dan ekstasi masuk ke Indonesia dengan jumlah mulai dari 100 kg sampai 500 kg dengan modus operandi menyamar-kan sabu dalam kemasan teh. (*)



mantan Mentan SYL dalam sebuah persidangan

Kiky menjelaskan lukisan itu dibeli dari Sujiwo Tejo pada 11 Agustus 2022 sebesar Rp200 juta. Ia menuturkan mendapat perintah untuk pembayaran lukisan tersebut dari pejabat Kementan bernama Arief Sopian dan Zulkifli.

"Pak Arief itu Kabag Rumah Tangga ya, kalau pak Zulkifli apa jabatannya?" tanya jaksa.

"Plt Kabiro Umum," jawab Kiky.

Jaksa lantas mendalami perintah dimaksud. Kiky mengatakan diminta datang ke ruangan Zulkifli. Kiky mengaku diminta untuk melakukan pembayaran atas lukisan dimaksud. Karena tidak ada uang, Kiky meminjam ke vendor sebanyak Rp130 juta dan menggunakan uang kas senilai Rp70 juta.

"Langsung Rp200 juta. Oke, kemudian?" cecar jaksa.

"Lalu saya tetap diminta untuk bayar hari

itu juga. Saya akhirnya minta bantuan ke pak Nasir, vendor," terang Kiky.

"Vendor di mana?" tanya jaksa.

"Vendor di kementarian pak, di biro umum. Pak Nasir transfer ke saya Rp130 juta. Saya ada uang kas. Jadi, totalnya Rp200 juta saya langsung transfer ke orangnya Sujiwo Tejo," jelas Kiky.

Meskipun begitu, ia mengaku tidak pernah melihat langsung lukisan tersebut. Namun, ia hanya pernah mendengar jika lukisan Sujiwo Tejo disimpan di Kantor NasDem.

"Saudara saksi mungkin dengar cerita yang lain, mungkin disimpan di rumah pribadi pak SYL atau kah di kantor atukah di rumah dinas?" tanya jaksa.

"Yang saya dengar itu di Kantor NasDem katanya, pak. Cuma saya enggak paham itu," kata Kiky.

Setelah sidang, jaksa

KPK Meyer Simanjuntak menjelaskan uang Rp70 juta yang digunakan untuk membeli lukisan tersebut berasal dari patungan pejabat eselon I Kementan.

"Lukisan Sujiwo Tejo bukan dari anggaran Kementan tapi dari dana sharing, dana sharing eselon eselon I yang sudah dikumpulkan," tutur Jaksa Meyer.

SYL didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp40.647.444.494 selama periode 2020-2023.

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. (*)

Saksi Sebut SYL Beli Lukisan Rp200 Juta Pakai Duit Kementan

Pewartu: Alwan

JAKARTA-Mantan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian (Kementan) RI Raden Kiky Mulya Putra

mengungkapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pernah membeli lukisan seniman Sujiwo Tejo senilai Rp200 juta menggunakan uang vendor dan pejabat eselon I Kementan. Pembelian lukisan itu dilakukan

pada 11 Agustus 2022.

Hal itu disampaikan Kiky saat dihadirkan tim jaksa KPK dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)

Jakarta Pusat, Senin (6/5).

"Apakah saksi juga pernah melakukan pembayaran pembelian lukisan pak menteri?" tanya jaksa KPK.

"Iya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

"Ya," jawab Kiky. "Bisa dijelaskan?" lanjut jaksa.

Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi Serius Jaga Inflasi Kota Baubau



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Kendali Pemerintah Kota Baubau di bawah kepemimpinan Pj. Wali Kota Dr. Muh. Rasman, SP., M.Si., dalam menjaga ketidaksatabilan harga di daerahnya menjadi pekerjaan yang tak boleh dianggap dianggap remeh oleh para pelaku ekonomi daerah, termasuk peran strategis pemerintah dengan melibatkan stakeholder terkait.

Seperti Jumat kemarin, 3 Mei 2024, kendati Wali Kota Dr Rasman berada di Ibu kota tetapi ia tetap meminta jajarannya menggerakan pemantauan kondisi lapangan dengan memantau langsung kesediaan bahan pokok strategis, baik di gudang penyimpanan, hingga di kawasan-kawasan pintu masuk distribusi barang tersebut di Baubau.

Dr. Rasman ingin memastikan Plh. Sekda dan Asisten II Setda untuk terus bergerak bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk menjaga kestabilan Inflasi yang belakangan cenderung tidak stabil. Sebab di bulan tertentu, Inflasi menurun dan stabil, tetapi di waktu tertentu menunjukkan kenaikan.

Dalam beberapa kesempatan, Dr. Rasman berpendapat harus ada upaya jangka pendek dan jangka panjang mengantisipasi ketidastabilan tersebut yang harus bisa dioperasionalkan oleh OPD teknis. Baik dalam bentuk

gerakan terpadu hingga hingga penerapan kebijakan, yang melibatkan banyak pihak. Tidak berjalan sendiri, apalagi sekedar ber-narasi tanpa tindakan teknis.

Dr. Rasman sadar, ketidakstabilan inflasi di Kota Baubau penyebabnya dari berbagai faktor. Mulai dari posisi Kota Baubau sebagai pendistribusi barang dan jasa ke berbagai daerah di kawasan kepulauan Buton, bahkan hingga di beberapa pulau-pulau di kawasan Laut Banda.

Dari sisi ini tentu kebutuhan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat selalu bergerak dinamis ke berbagai daerah, sementara masyarakat Kota Baubau juga sangat membutuhkan kestabilan stok pangan, agar warganya tidak didera dampak kenaikan harga.

Faktor lainnya, Baubau bukan kawasan agraris yang mampu menyediakan semua kebutuhan publik, seperti beras, dan tanaman

penunjang lainnya, seperti Tomat, Cabe, Bawang Merah, hingga jenis ikan tertentu yang menjadi indikator pengukur Inflasi. Tentu kebijakannya adalah menjaga distribusi hingga kerjasama dengan daerah-daerah sumber pangan. Baubau memang di posisi itu terasa berat. Tetapi bagi Dr. Rasman, di situ letak tantangan yang harus bisa diantisipasi.

Jumat sore kemarin, Pj. Wali Kota Baubau mendelegasikan tugas Inflasi ini kepada Plh. Sekda La Ode Aswad, S.Sos., M.Si., untuk memimpin rapat TPID, membahas tentang kondisi inflasi daerah termasuk pergerakan harga di bulan Mei 2024. Masukan teknis dari Kepala BPS Kota Baubau "Towedy Marthinus Layico mengemukakan prediksi penyebab infkasi di Kota Baubau di bulai Mai 2024 diantaranya, beras, tomat, cabe, bawang merah dan jenis ikan tertentu. La Ode Aswad me-

minta instansi teknis menyiapkan pola jangka pendek dan jangka panjang penanganannya termasuk update data TPID dan publikasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Jawaban sementara adalah Gerakan Pasar Murah, dan juga Gerakan Pangan Murah. Dua gerakan ini harus terus berjalan, dan memastikan semua langkah strategis untuk dilaporkan ke dievaluasi Wali Kota Baubau. Dinas Perindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan TPID harus bergerak simultan. Sementara bantuan-bantuan CSR dari pihak perbankan di daerah bisa dimaksimalkan untuk menjaga inflasi.

Data-data parsial yang berasal dari Dinas Sosial dan dinas lainnya juga harus selaras dengan upaya pengendalian Inflasi ini. Kata La Ode Aswad, Inflasi adalah salah satu pengukuran kinerja pemerintah daerah di mata pemerintah pusat. "Siapkan semua strategi operasional, dan mengurangi narasi, itu juga petunjuk pimpinan, semua harus dilaksanakan dengan baik," katanya. (**)

Pemkot Baubau Dukung Kesuksesan Program RKP Nasional BSSN

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP., M.Si melalui Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si saat membuka workshop Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di hotel Mira

Rabu (24/4/2024) mengatakan, peran pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus berupaya melakukan penguatan keamanan digital, salah satunya dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan di tahun 2024 ini, Kota Baubau

menjadi salah satu dari 32 (tiga puluh dua) pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai rencana kerja prioritas (RKP) nasional BSSN dalam program pembentukan CSIRT. Menurut La Ode Aswad, workshop pengelolaan CSIRT yang digelar Dinas Kominfo merupakan salah

satu bentuk dukungan Pemerintah Kota Baubau untuk sukseskan RKP nasional pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya berharap workshop ini dapat menciptakan harmonisasi dan sinergitas yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah. sehingga dapat mendukung ter-

Diskominfo Baubau Pindah Pelayanan di Kantor Baru Jl Cut Nyak Dien



Kantor Diskominfo yang baru di kantor eks Walikotif Baubau

Pewarta : Andina L

BAUBAU, BP-Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Baubau setelah sekian tahun berkantor di kawasan Palatiga, sejak sepekan ini telah pindah ke tempat baru di kantor eks Walikotif lama di bilangan jalan Cut Nyak Dien, yang bersebelahan dengan eks Rujab Bupati Buton dan Kantor Balitbangda serta berbagi ruangan dengan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau.

Tempat ini juga sebelumnya digunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang kini berpindah ke kawasan Lapangan lembah Hijau Baubau. Dengan demikian pindahnya kantor Dinas Kominfo juga berarti pelayanan pemerintahan ikut berpindah. Hal tersebut

disampaikan Sekretaris Diskominfo Baubau, Dr. Hamzah, SH., M.IKom., siang ini Senin, 6 Mei 2024.

"Pelayanan pemerintahan oleh Diskominfo, seperti teknis absensi Simalape, dan SP4N Laporan dan layanan informasi publik dilaksanakan di tempat baru ini, jadi silakan hubungi pihak kami di ex Walikotif," kata Dr. Hamzah.

Namun begitu, pihak Diskominfo dalam beberapa hari ke depan masih melakukan pembenahan memaksimalkan ruangan yang tersedia, sebab aset-aset masih banyak yang belum tertampung mengingat minimnya ruangan, termasuk renovasi beberapa ruangan yang banyak mengalami kerapuhan karena terkaman usia.

Hal itu disebabkan kantor yang ditempati adalah bangunan situs

bersejarah ex resident Controleur zaman Hindia Belanda, sehingga perlu regulasi tertentu untuk melakukan perbaikan.

Sebelumnya Kadis Kominfo H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., atas arahan Pj. Wali Kota Baubau mengingatkan jajarannya untuk beraktivitas di minggu pertama bulan Mei, dengan memaksimalkan potensi yang ada, dan menyiasati kendala-kendala teknisnya.

Beberapa hal yang perlu ditangani segera dengan kekuatan penganggaran yang terbatas, selain pembenahan ruangan juga penambahan daya listrik dari 4500 KWH menjadi 23 ribu KWH, akselerasi internet dan pengamanan server daerah. "Namun aktivitas administrasi perkantoran, telah dilaksanakan sejak sepekan ini," kata Dr. Hamzah (**)



Peserta Workshop CSIRT di Hotel Mira Baubau

wujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

"Saya ucapkan selamat melaksanakan workshop, semoga workshop yang dilakukan hari ini tidak sekedar menciptakan kemegahan sesaat, tetapi lebih mengentalkan komitmen kita untuk mengambil peran dalam upaya membangun kota baubau kedepan menjadi lebih sejahtera," ujarnya.

Ditambahkan, workshop pengelolaan CSIRT merupakan

momentum yang sangat penting untuk membangun persepsi dan pemahaman yang sama antar stakeholders di daerah tentang pentingnya implementasi aplikasi SPBE guna mendukung percepatan penerapan SPBE di daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Lebih lanjut dijelaskan, negara indonesia saat ini tengah berada pada titik persimpan-

gan dan periode krusial transformasi digital pemerintah yang akan menentukan kehidupan digital bangsa beberapa dekade ke depan.

Olehnya itu, perlu melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) termasuk didalamnya perlindungan infrastruktur informasi vital sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 82 tahun 2022. (*)